

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banjir merupakan salah satu isu penting dan merupakan salah satu gangguan yang berdampak pada aktivitas manusia di negara berkembang seperti Indonesia. Fenomena tersebut terjadi karena Indonesia merupakan sebuah negara dengan kondisi alam seperti geografis, topografis, dan geologisnya yang berada di jalur sirkum pasifik sehingga rawan terjadinya bencana termasuk bencana banjir. Hasil dari grafik yang diperoleh BNPB pada tahun 2021 menyatakan banjir sebagai peringkat pertama sebagai bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia yaitu sejumlah 1.288 kejadian atau 42,1% (Dihni, 2021). Pada tahun 2022 di semester I terhitung sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2022, bencana banjir masih menduduki peringkat pertama sebagai bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia yaitu sejumlah 747 kejadian. Jumlah ini setara dengan 38,78% dari total kejadian bencana alam di Indonesia (Annur, 2022).

Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat kedua sebagai provinsi yang memiliki tingkat bencana alam banjir paling tinggi di Indonesia dengan jumlah 1.249 kejadian (bps.go.id, 2021). Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi ancaman bencana alam banjir yang tinggi karena letaknya dekat dengan Pantai Utara Jawa (Pantura). Hal ini menjadikan seluruh wilayah kabupaten/kota di sepanjang Pantura Jawa Tengah sering dilanda bencana banjir rob (bnpb.go.id, 2022b).

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota Pesisir Pantura yang menghubungkan wilayah Jakarta, Semarang, dan Surabaya (pekalongan.go.id, n.d.). Dilihat dari aspek topografis, Kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar dengan rata-rata kemiringan lahan 0-5% sehingga kondisi ini dapat mempersulit pengaturan saluran drainase yang berdampak pada gangguan genangan banjir dan rob (Miftakhudin, 2021). Selain itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis riset dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh menunjukkan kondisi Kota Pekalongan sebagai Kota Pesisir Pantura mengalami perubahan geomorfologi pantai akibat ekstensifikasi tambak sehingga menyebabkan air laut yang semakin masuk ke daratan. Tinggi permukaan air laut menjadi lebih tinggi daripada daratan dengan radius 5 km dari garis pantai sehingga hal tersebut mengakibatkan banjir rob secara terus-menerus (Khomarudin et al., 2021).

Terjadinya penurunan muka tanah (*land subsidence*) turut menjadi faktor penyebab banjir rob di Kota Pekalongan (Bappeda Kota Pekalongan, 2020). BRIN mengidentifikasi tingkat penurunan muka air tanah (*land subsidence*) di Kota Pekalongan saat ini menjadi yang tertinggi dari 4 Kota Pantura lainnya seperti Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Surabaya dengan ketinggian 12 cm per tahun (Khomarudin et al., 2021). Sehingga pengaruh penurunan muka tanah menjadi faktor paling tinggi terhadap perubahan luas genangan banjir rob (Miftakhudin, 2021).

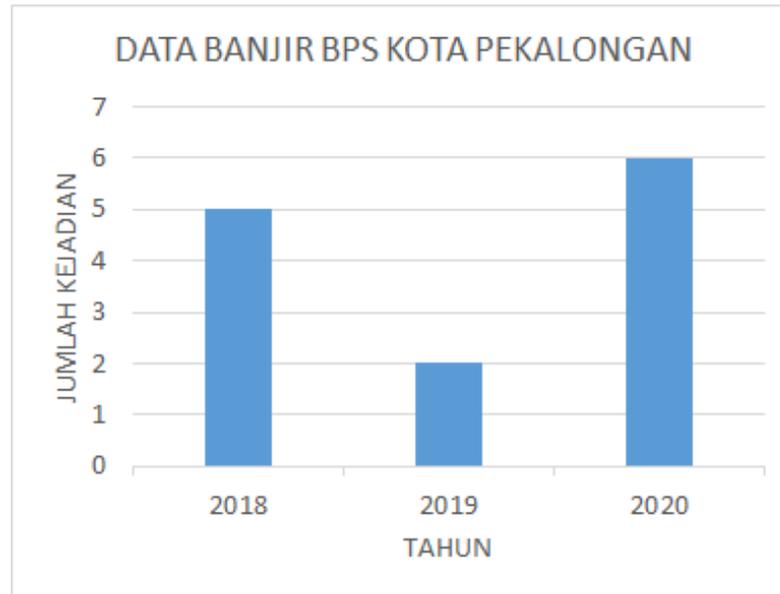
Fenomena banjir rob berdampak pada kerugian di berbagai aspek. Adapun beberapa kerugian diantaranya adalah mengakibatkan kawasan yang terdampak banjir

rob menjadi permukiman kumuh karena rusaknya infrastruktur dan fasilitas umum. Hal ini berimplikasi pada kerugian material mencapai triliunan rupiah (kompas.tv, 2021). Selain itu, ada pula kerugian nonmaterial berupa terganggunya aktivitas masyarakat Kota Pekalongan akibat adanya genangan banjir rob. Dampak kerugian yang diakibatkan banjir rob akan semakin besar dan masif apabila tidak ada upaya tindak lanjut dari Pemerintah Kota Pekalongan. Atas kondisi tersebut, banjir rob menjadi permasalahan serius yang harus segera ditindak lanjuti.

Untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki program untuk pengendalian banjir rob melalui mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tentang Penanggulangan Bencana, 2007). Mitigasi bencana menjadi topik yang penting untuk diteliti sebab mitigasi berperan sangat vital dalam proses kebencanaan. Jika ancaman bahaya dan risiko bencana dapat diminimalisasikan maka upaya kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan tidak memerlukan biaya dan tenaga yang lebih besar (Musdah & Husein, 2014).

Tabel 1.1

Grafik Data Jumlah Kejadian Banjir Rob di Kota Pekalongan Tahun 2018-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Data grafik di atas menunjukkan jumlah kejadian banjir pada tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi. Sedangkan BPBD Kota Pekalongan menambahkan bahwa pada tahun 2021 jumlah kejadian bencana alam banjir di Kota Pekalongan meningkat menjadi 7 kejadian (bnpb.go.id, 2022a). Berdasarkan hal itu, Pemerintah Kota Pekalongan dinilai tidak mampu dalam mengimbangi peningkatan *land subsidence* secara linear beserta laju pembangunan yang semakin masif dengan diadakannya program-program untuk mengurangi kerentanan banjir rob baik secara struktural maupun non-struktural. Fakta tersebut menunjukkan kegagalan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menekan peningkatan jumlah kejadian banjir rob.

Didukung oleh pendapat Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) yang mengungkapkan bahwa permasalahan banjir rob di Kota Pekalongan cukup kompleks mulai dari permasalahan *land subsidence* yang turun di setiap tahunnya, hingga permasalahan pola hidup manusia terhadap dampak lingkungan. Adanya keterbatasan sumber daya pendanaan dalam pembuatan infrastruktur seperti pembuatan tanggul dan sistem polder guna memitigasi bencana banjir rob memerlukan anggaran yang sangat besar, sedangkan kemampuan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal pendanaan relatif kecil. Berbagai upaya mitigasi banjir rob telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sejak tahun 2014 agar Kota Pekalongan bebas dari adanya banjir rob. Dari mulai melokalisasi banjir, peninggian jalan di perkampungan, pembangunan sistem polder, perbaikan sistem drainase, pembangunan rumah pompa hingga penanaman hutan *mangrove* telah dilakukan dengan menelan biaya mencapai puluhan miliar rupiah (Ramadhanni, 2015). Namun, dengan keterbatasan sumber daya finansial tersebut mengakibatkan bentuk program infrastruktur pengendali banjir rob dari Pemerintah Kota Pekalongan belum juga tuntas.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat juga masih kurang, terutama tenaga ahli yang bisa memberikan gagasannya dalam pengambilan setiap keputusan. Kesiapan sumber daya manusia di tingkat masyarakat juga belum mampu untuk beradaptasi terhadap banjir rob (Miftakhudin, 2021). Realitas tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan tidak mampu dalam memitigasi banjir rob sendirian. Sehingga diperlukan adanya keterlibatan pihak lain (*stakeholders*)

yang secara bersama-sama melakukan kolaborasi dalam memitigasi banjir rob sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal (Sihaloho, 2022). DSDAN merekomendasikan untuk dilakukannya koordinasi yang terintegrasi dengan instansi-instansi terkait dan juga masyarakat supaya permasalahan banjir rob dapat terselesaikan dengan maksimal (pekalongankota.go.id, 2021b). Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sunarharum (2016) bahwa *collaborative governance* bisa mengatasi berbagai hambatan di masyarakat, seperti: a) perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat tentang penanganan banjir, b) keterbatasan literasi teknis dan pengetahuan masyarakat terdampak, dan c) keterbatasan kapasitas pemerintah dalam merumuskan kebijakan tepat sasaran untuk mitigasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan mengajak berbagai *stakeholder* untuk berkolaborasi dalam memitigasi bencana banjir rob. Salah satu *stakeholder* yang terlibat adalah LSM BINTARI Foundation. BINTARI Foundation atau Bina Karta Lestari Foundation merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional bergerak dalam perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. BINTARI Foundation merupakan mitra unggul dalam transformasi masyarakat yang memiliki ketahanan dan berkelanjutan yang bekerja sama dengan pemerintah termasuk Pemerintah Kota Pekalongan. Transformasi tersebut diwujudkan melalui program pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, pengelolaan limbah, pengelolaan bencana, pengelolaan kawasan pesisir, pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan pengelolaan dampak dan sumber perubahan iklim. Dalam

kolaborasinya, BINTARI Foundation dan Pemerintah Kota Pekalongan mewujudkan program TANGGUH (Peningkatan Tanggap dan Pemulihan Bencana Iklim dan Lingkungan) untuk mendampingi masyarakat dalam mengelola dampak banjir dan rob seperti abrasi pantai, kerusakan *mangrove* dan tambak, sampah pesisir dan sanitasi (devjobsindo.org, 2020). Pada 2020 silam, BINTARI Foundation dan Pemerintah Kota Pekalongan telah berhasil mengadakan program Pembangunan MCK Adaptif sebagai upaya terkait permasalahan sanitasi yang terjadi di wilayah Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara. Program ini turut menggandeng beberapa aktor lainnya seperti LSM Kemitraan, Akademisi yakni Universitas Pekalongan dan Universitas Diponegoro, dan juga Masyarakat sehingga bisa dikatakan bahwa kolaborasi ini merupakan kolaborasi multi-sektor, Dengan adanya program MCK tersebut diharapkan bisa menjadi *pilot project* untuk wilayah lain yang terdampak banjir rob (pekalongankota.go.id, 2020).

Perkembangan kota yang semakin masif menjadikan bentuk pengendalian banjir rob dari pemerintah kalah cepat. Adanya keterbatasan sumber daya baik itu sumber daya finansial maupun sumber daya manusia turut menjadikan bentuk pengendalian bencana banjir rob oleh Pemerintah Kota Pekalongan tidak maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih meluasnya banjir rob di berbagai sudut daerah Kota Pekalongan. Adanya ketidakmampuan pemerintah dalam memitigasi bencana banjir rob sendirian menjadi alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan.

Keterlibatan komunitas akar rumput atau LSM BINTARI Foundation yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan menjadi menarik untuk diteliti,

sebab partisipasi sebuah komunitas yang tergabung dalam sebuah organisasi, menurut Sulistyani (2016) dapat mempengaruhi efektivitas penanggulangan bencana. Selain itu, keberadaan LSM BINTARI Foundation yang sudah berdiri sejak tahun 1986 sudah terbukti memberikan sumbangsih nyata dalam penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan di berbagai wilayah sehingga LSM ini dianggap cocok untuk menjawab persoalan yang ada. Kemudahan dalam pengambilan data dan informasi juga menjadi alasan mengapa LSM BINTARI Foundation dijadikan subjek penelitian. Di sisi lain penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji dan menelaah tentang bagaimana *collaborative governance* yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dan BINTARI Foundation dalam upaya mitigasi bencana banjir rob dengan penataan terpadu dan sesuai dengan skala prioritas pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *collaborative governance* Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation dalam proses mitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah bentuk *collaborative governance* Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation terhadap upaya mitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi dalam pengembangan pengetahuan serta menambah wawasan khususnya tentang bentuk sinergitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan *stakeholder* (LSM BINTARI Foundation) dalam upaya mitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan diadakannya penelitian ini harapannya dapat dijadikan rekomendasi dan evaluasi kinerja bagi pemerintah terkait sinergitas dengan *stakeholder* (LSM BINTARI Foundation) dalam upaya mitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan.

1.5 Literature Review

Dalam kajian literatur ini, dapat diambil beberapa hasil penelitian yang mendukung penelitian saat ini oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Tabel 1.2
Kajian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Temuan
1.	(Sa'diyah et al., 2020)	Indeks Keterpaparan Banjir dan Banjir Pasang di Kota dan Kabupaten Pekalongan	Hasil penelitian ini mendeskripsikan Kota Pekalongan termasuk dalam wilayah rawan terhadap dampak perubahan iklim, yakni banjir dan banjir pasang. Pekalongan memiliki indeks keterpaparan banjir (sejauh apa dampak suatu sistem dengan gangguan) yang tinggi yakni 40%. Terdapat kerugian-kerugian yang ditimbulkan baik secara material dan <i>immaterial</i> yang merugikan masyarakat sehingga diperlukannya sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dalam pengendalian banjir dan rob.
2.	(Ramadhanni, 2015)	Implementasi Program Penanganan Banjir Rob di Wilayah Pesisir Kota Pekalongan	Dalam penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan rob ternyata sudah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Namun penanggulangan rob di Kecamatan Pekalongan Utara menemui berbagai kendala. Seperti perbatasan wilayah rob dengan wilayah lain menyebabkan penanganan yang tidak tuntas, keterbatasan sarana prasarana pompa air yang tidak memadai, keterbatasan anggaran, serta perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap program penanggulangan banjir rob.

3.	(Hardianto et al., 2017)	Analisis Kebijakan Penanggulangan Banjir Pasang Air Laut (ROB) di Kota Pekalongan	Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Pekalongan sudah mengarah pada kebijakan penanggulangan banjir rob. Namun kebijakan tersebut belum bisa mengatasi persoalan yang ada karena anggaran yang kurang memadai. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan yakni meminta bantuan kepada PUPR dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, pemerintah diharapkan mendorong partisipasi masyarakat agar penyelesaian banjir rob cepat teratasi.
4.	(Ula & Tijan, 2021)	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Rob di Kabupaten Pekalongan	Penelitian ini menemukan bahwa pengendalian banjir rob memerlukan adanya kebijakan berbasis ekologi secara menyeluruh dan perencanaan penggunaan tata ruang di area tanggul.
5.	(Tiwow et al., 2019)	Mitigasi Bencana Banjir Berbasis Sekolah	Dalam penelitian ini ditemukan permasalahan kurang optimalnya mitigasi bencana banjir datang dari kurangnya pengetahuan mengenai penyebab banjir dan mitigasi bencana, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya lingkungan berkelanjutan, banjir dan penyebabnya, serta upaya mitigasi banjir berbasis sekolah. Untuk itu, diperlukan adanya upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya mitigasi banjir.
6.	(Taslim, 2019)	Koordinasi Publik Untuk Pengurangan Risiko Bencana PRB	Dalam penelitian ini menunjukkan pada wilayah yang rawan akan banjir koordinasi antar pihak

		Banjir Pada Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Gorontalo	dalam pengurangan risiko bencana sangat penting untuk dilakukan.
7.	(Mutiarawati & Sudarmo, 2021)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan	Hasil dalam penelitian ini adalah bentuk kolaborasi untuk menyelesaikan pasang surut banjir di Kelurahan Bandengan tidak dilakukan secara optimal dan masih dibutuhkan reformasi dengan mensinergikan berbagai perspektif pemangku kepentingan, lebih dekat dengan masyarakat, dan memperluas kerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya, dan perekrutan SDM.
8.	(Sihaloho, 2022)	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Medan	Dalam penelitian ini menunjukkan hasil mengenai aspek-aspek prioritas yang khas dalam penanganan banjir di Kota Medan yang ditindak lanjuti melalui <i>collaborative governance</i> dengan berbagai aktor sehingga dapat meminimalisasi risiko kerugian yang ditimbulkan akibat bencana banjir.
9.	(Arfani, 2022)	Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Pada Destinasi Wisata di Desa Kalanganyar Sidoarjo	Dalam penelitian ini menyimpulkan tentang kolaborasi penta helix berperan serta dalam penanganan bencana dengan berkolaborasi dan bersinergi dalam penanganan seperti unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, masyarakat, dan media massa. Dengan melaksanakan kolaborasi pentahelix masyarakat dapat

			memperoleh pengetahuan mengenai pengurangan risiko bencana sehingga dapat melakukan upaya preventif.
10.	(Widyaningsih, 2020)	Manajemen Kolaboratif Dalam Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Banjarnegara	Dalam penemuan ini ditemukan adanya faktor penghambat dan pendorong tata kelola kolaboratif. Faktor pendukungnya adalah adanya komunikasi, komitmen, dan saling memahami antara para <i>stakeholder</i> yang diwujudkan dengan kerja sama dan kesadaran dari semua elemen akan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya keterbatasan SDM, peralatan dan anggaran dapat teratasi dengan adanya kolaborasi tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai *Collaborative Governance* banyak mengkaji mengenai pentingnya sinergitas dan kolaborasi antar-elemen untuk mengatasi bencana banjir rob dan penyebab bencana rob di suatu daerah. Namun demikian, berdasarkan penelitian terdahulu belum terdapat hasil penelitian yang mengkaji *Collaborative Governance* terhadap bencana banjir rob di Kota Pekalongan secara menyeluruh karena hanya mengkaji di wilayah pesisir saja, sedangkan bencana banjir rob di Kota Pekalongan sudah terjadi di berbagai wilayah bukan hanya di wilayah pesisir.

Subjek pelaksana *Collabrative Governance* dalam penelitian terdahulu juga hanya berfokus terhadap entitas instansi pemerintah saja, yakni Pemerintah Kota Pekalongan dan jajarannya seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekalongan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Fasilitator Kelurahan Senior Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Bandengan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Bandengan dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bandengan. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian terdahulu belum ditemukan kajian mengenai elemen yang melaksanakan *Collaborative Governance* yang berasal dari luar instansi pemerintah seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yayasan, dan lain-lain.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena penelitian ini menganalisis berbagai hal yang belum didapatkan dari penelitian terdahulu seperti *scoop* atau jangkauan penelitian terdahulu tidak mengkaji wilayah Pekalongan secara menyeluruh, tetapi hanya di wilayah pesisir saja dan subjek pelaksana *Collaborative Governance* penelitian terdahulu hanya terpaku terhadap lembaga milik pemerintah sehingga dalam penelitian ini penulis mengkaji penerapan *collaborative governance* di wilayah Kota Pekalongan secara menyeluruh dan mengkaji kerja sama penanganan banjir rob dengan entitas non-pemerintah, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat.

1.6 Kerangka Teori

Dalam melaksanakan suatu penelitian, peneliti harus mempunyai dasar teori sebagai landasan peneliti sebagai acuan untuk penguat argumentasi atau indikator dari penelitian tersebut. Maka dari itu peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut.

1.6.1 Collaborative Governance

Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Ada sekian banyak pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam. Beragamnya pengertian tersebut didasari oleh prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab dan tanggung gugat. Namun demikian, untuk mendefinisikan secara utuh dan menyeluruh konsep kolaborasi tidaklah mudah. Secara umum kolaborasi adalah hubungan antar-organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumber daya, berbagi manfaat, dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Kolaborasi merupakan salah satu dari bentuk interaksi sosial. Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling memahami aktivitas masing-masing (Abdulsyani, 1994).

Sedangkan dalam istilah administrasi, pengertian kolaborasi sebagaimana dijelaskan oleh Hadari Nawawi (1984) bahwa usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas, tidak sebagai pengotakan kerja tetapi sebagai satu kesatuan kerja yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan. Terdapat tiga jenis kolaborasi yang didasarkan perbedaan antara organisasi grup yaitu: Kolaborasi Primer, Kolaborasi Sekunder, Kolaborasi Tersier.

Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif (*collaborative governance*) menurut Ansel dan Gash (2008) merupakan suatu bentuk susunan di dalam pemerintahan dimana suatu instansi publik bekerja sama dengan *stakeholders non-state* dalam sebuah pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada kesepakatan bersama, dan bertujuan pada pengimplementasian kebijakan publik atau manajemen publik. Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) mendefinisikan pengertian *collaborative governance* lebih luas yakni merupakan sebuah proses dan struktur dari pengambilan keputusan atau kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan-badan publik, berbagai *level* pemerintahan dan atau pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama.

Menurut Bingham (2010) *collaborative governance* merupakan sistem pemerintahan kolaborasi yang melibatkan aktor *state* dan *non-state* di beberapa

sektor untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Edward Deseve (2009) mendefinisikan *collaborative governance* adalah sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas-batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan definisi kesuksesan yang jelas.

1.6.1.1 Aktor Collaborative Governance

Dalam teori *collaborative governance* terdapat istilah *governance* yang berasal dari kata “*govern*” yang artinya mengambil peranan yang besar yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah (Dwiyanto, 2015:251). Dalam konsep ini, *governance*, pemerintah (*government*) merupakan salah satu aktor dan bukan merupakan aktor tunggal sehingga dalam proses *governance* terdiri dari 3 aktor utama yakni aktor *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (swasta), dan aktor *non-state* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsi dan peranannya masing-masing (Chema dan Keban, 2008). Namun di dalam penelitian ini akan berfokus pada *collaborative governance* yang dilakukan oleh aktor *state* yakni pemerintah dan aktor *non-state* yakni masyarakat.

1.6.1.2 Tujuan Collaborative Governance

Pada hakikatnya tujuan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu antara *stakeholder* satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulsyani (1994) kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Demikian juga halnya menurut Roucek dan Warren yang mengatakan bahwa “kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama”.

Tujuan dari tata kelola pemerintahan yang kolaboratif adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan secara bersama-sama. Bahkan dalam proses pencapaian tujuan tersebut tidak dianjurkan melakukan pengotakan tugas-tugas yang diembannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nawawi (1984) bahwa kolaborasi merupakan usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.

1.6.1.3 Indikator Keberhasilan Collaborative Governance

Pendekatan Edward Deseve dalam mengukur keberhasilan *collaborative governance* telah mencakup seluruh proses kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai *leading sector* dan *stakeholder* lain sebagai *supporting system* sehingga dinilai komprehensif untuk digunakan dalam penelitian ini. Dalam teorinya, Edward Deseve menjelaskan seluruh proses kolaborasi yang dimulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Secara spesifik Edward Deseve (2009) mengemukakan adanya 8 indikator dalam mengukur keberhasilan *collaborative governance* yaitu:

1. *Network Structure* (Struktur Jaringan)

Network structure atau struktur jaringan adalah menjabarkan secara konseptual terkait antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang saling terikat secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik jaringan. Dalam tata kelola pemerintahan yang kolaboratif (*collaborative governance*) unsur jaringan tidak boleh membentuk hirarki (kekuasaan dari salah satu pihak). Oleh karena itu dalam pemerintahan kolaboratif, jaringan harus bersifat organis dengan struktur jaringan yang terlibat sehingga tidak ada hirarki kekuasaan, dominasi, dan monopoli. Semua pihak memiliki kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama.

2. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen Terhadap Tujuan)

Commitment to a common purpose atau komitmen terhadap tujuan ini merupakan alasan mengapa sebuah *network* atau jaringan harus ada yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada secara bersama-sama. Tujuan-tujuan ini biasanya terdapat pada misi umum suatu organisasi pemerintah. Selain itu, komitmen yang terjalin tidak boleh memihak salah satu *stakeholders* atau pemangku kepentingan kebijakan. Karena ini mengartikan bahwa kolaborasi yang terjalin hanya menguntungkan salah satu pihak. Sehingga komitmen yang terjalin dalam pemerintah kolaboratif harus untuk kepentingan bersama melalui pencarian solusi bersama.

3. *Trust Among the Participants* (Adanya Saling Percaya Antar Pelaku/Peserta)

Trust among the participants atau adanya saling percaya antar-pelaku merupakan adanya hubungan kerja sama secara profesionalitas dan adanya rasa saling percaya antar-*stakeholder* baik dari segi berbagi informasi atau usaha dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

4. *Governance* (Kejelasan Dalam Tata Kelola)

Governance atau kejelasan dalam tata kelola merupakan hubungan saling percaya di antara para aktor *governance* atau pemerintahan. Selain itu, ada aturan yang disepakati bersama dari setiap pemangku kepentingan, serta ada kebebasan dalam menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan.

5. *Access to Authority* (Akses Terhadap Tujuan)

Access to authority atau akses terhadap tujuan adalah adanya standar dan prosedur yang jelas yang dapat diterima secara luas, artinya sudah ada aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh masing-masing *stakeholders* untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya.

6. *Distributive Accountability/Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas)

Distributive Accountability/Responsibility atau pembagian akuntabilitas merupakan penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholders* dan berbagi keputusan kepada seluruh anggota jaringan, serta berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas, dan masing-masing *stakeholders* (termasuk masyarakat) harus terlibat dalam pembuatan keputusan kebijakan.

7. *Information Sharing* (Berbagi Informasi)

Information sharing atau berbagi informasi adalah kemudahan anggota dalam mengakses informasi, disertai dengan adanya perlindungan *privacy* mengenai keterbatasan akses bagi yang tidak termasuk anggota sepanjang dapat diterima oleh semua pihak.

8. *Access to Resources* (Akses Terhadap Sumber Daya)

Access to resources atau akses terhadap sumber daya merupakan ketersediaan sumber daya seperti manusia, keuangan, dan sumber daya lainnya berupa sarana prasarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan

network. Jadi, harus ada kejelasan dan ketersediaan sumber daya bagi masing-masing *stakeholders* yang terlibat.

1.6.2 Mitigasi Bencana

Giri Wiarto (2017) mendefinisikan mitigasi bencana sebagai upaya berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana terhadap manusia dan harta benda. Sedangkan Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mitigasi didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, 2008).

Mitigasi bencana merupakan suatu upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tentang Penanggulangan Bencana, 2007).

Coppola (2006) kemudian membagi mitigasi bencana menjadi dua cara yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi secara struktural merupakan mitigasi yang berhubungan dengan konstruksi, keahlian tehnik, atau perubahan mekanik lainnya dalam mengurangi risiko dari konsekuensi/kemungkinan bahaya. Sedangkan mitigasi non struktural diartikan

sebagai pengurangan risiko dari kemungkinan/konsekuensi melalui modifikasi kebiasaan manusia atau proses alami, tanpa melibatkan penggunaan keahlian teknik struktur.

Mitigasi bencana merupakan salah satu bagian dari manajemen kebencanaan. Menurut UU No. 24 Tahun 2007 manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas dan rekonstruksi bencana. Manajemen bencana meliputi tahapan pra bencana (sebelum bencana terjadi), saat bencana terjadi, dan pasca bencana (setelah bencana terjadi).

Gambar 1.1
Siklus Manajemen Bencana



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tahapan manajemen bencana yang telah disebutkan di atas kemudian terbagi lagi menjadi 4 bagian, meliputi kesiapsiagaan, tanggap darurat, pasca tanggap darurat, dan mitigasi serta pencegahan bencana. Keempat bagian ini berbentuk seperti lingkaran yang siklusnya akan berjalan secara terus-menerus dalam proses manajemen bencana. Adapun tujuan mitigasi bencana adalah:

1. Untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana alam terutama terhadap manusia seperti korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan bangunan dan sumber daya alam lainnya,
2. Menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan,

3. Meningkatkan kesadaran akan manajemen risiko bencana sehingga setiap orang dapat hidup dengan aman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 20 Ayat (2), kegiatan mitigasi secara umum dapat dilakukan melalui:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
- b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan;
- c. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, 2008).

1.6.3 Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana

Collaborative governance merupakan konsep publisitas yang muncul untuk merespon kegagalan implementasi, biaya yang tinggi, dan politisasi regulasi pada sektor publik (Ansel dan Gash, 2007). Dalam proses mitigasi bencana, keberadaan kolaborasi antar-*stakeholder* sangat penting untuk dilakukan. Risiko bencana dapat dikurangi melalui program kolaboratif untuk mengembangkan perspektif mitigasi bencana dan perencanaan tata ruang berdasarkan pemetaan dan penilaian risiko bencana (Samboteng et al., 2022).

Menurut (Masyhuri et al., 2021) dalam pelaksanaan mitigasi bencana membutuhkan ketersediaan SDM yang terlatih dan memumpuni, anggaran yang memadai serta ketersediaan sarana prasarana yang menunjang proses mitigasi bencana. Dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana menjabarkan kegiatan dan program mitigasi bencana meliputi tindakan, pelaksanaan, peraturan perundang-undangan tentang bangunan, perencanaan tata guna lahan, pembangunan infrastruktur bencana seperti pembuatan tanggul, dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya pelaksanaan mitigasi bencana (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, 2012).

Afrian (2020) menyebutkan bahwa dalam kegiatan mitigasi banjir secara spesifik dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui mitigasi secara struktural dengan melakukan pembangunan fisik seperti pembuatan tanggul di daerah rawan banjir dan dengan mitigasi non-struktural yakni dengan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye akan pentingnya menjaga lingkungan.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan memperlancar proses mitigasi di atas maka diperlukan adanya kolaborasi antar-*stakeholder*. Pendapat ini kemudian mendukung digunakannya model *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Edward Deseve (2009) karena dinilai cukup komprehensif

untuk menjawab permasalahan kerja sama dalam upaya mitigasi bencana banjir rob. Model ini menyajikan 8 indikator untuk mengukur keberhasilan *collaborative governance* meliputi, 1) *network structure*, 2) *commitment to a common purpose*, 3) *trust among the participants*, 4) *governance*, 5) *access to authority*, 6) *distributive accountability*, 7) *information sharing*, 8) *access to resources*. Setiap indikator tersebut menjabarkan bagaimana para *stakeholder* bekerja sama dan terlibat aktif dalam kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi yakni pengurangan risiko bencana banjir rob.

Adapun *stakeholder* dalam proses *collaborative governance* dalam mitigasi bencana banjir rob tidak luput dari peran pemerintah sebagai *leading sector* dan didukung oleh masyarakat dan swasta sebagai *supporting system* (Masyhuri et al., 2021). Dalam hal ini Pemerintah Kota Pekalongan sebagai *leading sector* dan LSM BINTARI Foundation sebagai *supporting system* yang saling melakukan kolaborasi untuk memitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Collaborative Governance

Berdasarkan kerangka teori, *collaborative governance* adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan melibatkan *stakeholder* satu dengan yang lain. Konsep *collaborative governance* dapat didefinisikan juga untuk menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan pihak

institusi seperti pemerintah dengan *stakeholder* lain. Sekian banyak pengertian yang telah dikemukakan dengan sudut pandang yang beragam namun tetap didasari prinsip yang sama yaitu mengenai sinergitas, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan dan tanggung jawab.

Selain seperti dalam kerja sama, para pihak berkolaborasi biasanya dengan harapan mendapatkan hasil-hasil yang inovatif, terobosan, dan atau luar biasa, serta prestasi kolektif yang memuaskan. Kolaborasi biasanya dilakukan agar memungkinkan untuk berkembangnya rasa saling pengertian dan realisasi visi bersama dalam lingkungan dan sistem yang kompleks.

Pada sektor publik misalnya, kolaborasi dipahami sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab antara beberapa entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta berbasis masyarakat. Pihak-pihak entitas yang berkolaborasi bisa dari *government*, *civil society*, dan *private sector*. Tujuan utama dalam kolaborasi sektor publik diperuntukkan pada peningkatan pelayanan pada masyarakat.

1.7.2 Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan bahaya dengan cara mengubah paradigma masyarakatnya dan membentuk masyarakat yang tanggap bencana, membuat suatu inovasi seperti bangunan untuk menahan suatu bencana tertentu, serta mengkaji risiko bencana melalui pemetaan wilayah bencana sebagai langkah awal dalam melakukan mitigasi bencana.

1.7.3 Collaborative Governance Dalam Mitigasi Bencana

Collaborative governance dalam mitigasi bencana merupakan sebuah proses untuk memitigasi bencana yang di dalamnya melibatkan berbagai *stakeholder* terkait yang mengusung kepentingan masing-masing instansi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam kegiatan mitigasi banjir secara spesifik dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui mitigasi secara struktural dengan melakukan pembangunan fisik seperti pembuatan tanggul di daerah rawan banjir dan dengan mitigasi non-struktural yakni dengan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye akan pentingnya menjaga lingkungan.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur yang penting dalam suatu penelitian yang memberikan informasi tentang pengukuran variabel penelitian tersebut. Adapun definisi operasional dalam penyusunan penelitian mengenai *Collaborative Governance* Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob di Kota Pekalongan terdapat 8 faktor yang mendukung *collaborative governance* menurut Edward Deseve (2009) antara lain:

Tabel 1.3 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
1. <i>Network Structure</i> (Struktur Jaringan)	A. Jaringan Kolaborasi Pemerintah dan LSM dalam memitigasi bencana banjir rob	a. Adanya MoU/Kesepakatan bersama b. Penguatan kelembagaan antar- <i>stakeholder</i> yang diwujudkan dalam rapat koordinasi membahas mengenai mitigasi banjir rob di Kota Pekalongan
2. <i>Commitment to a Common Purpose</i> (Komitmen Terhadap Tujuan)	A. Tujuan bersama untuk memitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan	a. Visi, Misi, dan Tujuan dalam memitigasi bencana banjir rob (drealisasikan dalam bentuk program kerja)
3. <i>Trust Among the Participants</i> (Adanya Saling Percaya Antar-Pelaku/Peserta)	A. Profesionalitas	a. Adanya rasa percaya antar-pelaku baik dari berbagi informasi atau usaha satu sama lain b. Adanya kriteria yang dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk menjadi pihak kolaborator
	B. Ketepatan dalam pelaksanaan tugas	a. Tepat waktu dan tepat sasaran dalam pelaksanaan program mitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan
4. <i>Governance</i> (Kejelasan Tata Kelola)	A. Kejelasan Tata Kelola	a. Kejelasan anggota kolaborasi b. Kejelasan informasi c. Kejelasan dalam memberikan pertanggung jawaban
5. <i>Access to Authority</i> (Akses Terhadap Tujuan)	A. Kewenangan	a. Landasan hukum tentang mitigasi bencana banjir rob
6. <i>Distributive Accountability/</i>	A. Penataan	a. Pembagian tanggung jawab

<i>Responsibility</i> (Pembagian Akuntabilitas)		b. Proses perencanaan hingga evaluasi program kebijakan mitigasi bencana banjir rob sesuai dengan prosedur mitigasi
7. <i>Information Sharing</i> (Berbagi Informasi)	A. Kemudahan dalam mengakses informasi	a. Mudahnya dalam mengakses informasi bagi <i>stakeholder</i> dan masyarakat terdampak banjir rob
8. <i>Access to Resources</i> (Akses Terhadap Sumber Daya)	A. Sumber Daya Manusia	a. Adanya Sumber Daya Manusia yang memadai
	A. Sumber Daya Finansial	a. Ketersediaan anggaran program kebijakan
	B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	a. Ketersediaan sarana dan prasarana

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber dan beberapa data yang didapat di lapangan. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku individu-individu yang diamati.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berupaya untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan yang apa adanya, untuk itu dalam penelitian ini dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta tanpa hipotesis. Penulis menggunakan penelitian jenis ini karena penulis ingin menjelaskan secara mendalam mengenai bentuk *collaborative governance* dalam mitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation. Jenis penelitian deskriptif ini dianggap cocok untuk menjelaskan masalah dalam judul tersebut karena kerja sama pemerintah dan LSM dalam mitigasi bencana banjir rob tidak dapat dijelaskan dalam bentuk angka (kuantitatif), tetapi membutuhkan penelitian mendalam melalui wawancara. Hasil wawancara tersebut nantinya akan berupa penjelasan (deskripsi).

Untuk melengkapi penelitian ini, didukung oleh berbagai sumber bacaan yang menjadi acuan dalam pengerjaan penelitian. Sumber data yang digunakan

adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal, artikel, *website*, dan sumber bacaan lainnya yang bersifat resmi dan sesuai dengan topik penelitian.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Penelitian ini dilakukan di wilayah tersebut karena wilayah tersebut merupakan daerah yang setiap tahunnya mengalami banjir rob secara merata dan terus-menerus dan memiliki dampak yang paling parah terhadap masyarakatnya.

1.9.3 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari peristiwa aktual yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sumber data ini bisa diperoleh melalui proses wawancara sehingga didapatkan hasil berupa kata atau frasa. Dalam penelitian ini penulis hendak mewawancarai beberapa *stakeholder* yang terkait dengan topik penelitian yaitu:

- a. Organisasi Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari BAPPEDA dan BPBD Kota Pekalongan
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat BINTARI Foundation

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian

seperti berita, notulen rapat, peraturan perundang-undangan, artikel, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian dari sumber-sumber data. Teknik pengumpulan data merupakan instrumen penting dalam penelitian sebab teknik pengumpulan data ini nantinya akan digunakan untuk menyusun instrumen penelitian. Peneliti mendapatkan sumber data-data ilmiah melalui dua teknik pengumpulan data, meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai (narasumber) melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014). Metode wawancara dilakukan dengan melakukan sesi tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber sehingga didapatkan data yang orientik dan informatif.

Wawancara bertujuan untuk mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang didapatkan dari individu sehingga peneliti mendapatkan data yang lebih banyak dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada LSM BINTARI Foundation dan Pemerintah Kota Pekalongan sebagai subjek penelitian yang melakukan kolaborasi untuk memitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan.

b. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik wawancara, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik dokumentasi menurut Hamidi (2004) merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga, organisasi, ataupun perseorangan. Menurut Sugiono (2013) dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, seperti LSM. Dokumen yang diperoleh dapat berupa laporan hasil penelitian, agenda, catatan, buku, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian guna menunjang penelitian. Tujuan dilakukannya teknik dokumentasi adalah mencari relevansi sebagai landasan untuk menganalisis data. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang profil LSM BINTARI Foundation dan Pemerintah Kota Pekalongan.

Tabel 1.4 Identifikasi Kebutuhan Data

No.	Variabel	Kebutuhan Data	Jenis Data	Metode
1.	<i>Network Structure</i> (Struktur Jaringan)	a. Informasi mengenai perjanjian MoU Kesepakatan dalam mitigasi bencana banjir rob b. Informasi mengenai rapat koordinasi	Primer dan Sekunder	Wawancara 1. Pemerintah Kota Pekalongan 2. LSM BINTARI Foundation
2.	<i>Commitment to a Common Purpose</i> (Komitmen Terhadap Tujuan)	a. Informasi mengenai visi, misi, dan tujuan dalam mitigasi bencana banjir rob b. Informasi tentang pelaksanaan visi dan misi melalui program kerja	Primer dan Sekunder	Wawancara 1. Pemerintah Kota Pekalongan 2. LSM BINTARI Foundation
3.	<i>Trust Among the Participants</i> (Adanya Saling Percaya Antar-Pelaku/Peserta)	a. Informasi tentang adanya rasa saling percaya antar-pelaku b. Informasi tentang ketepatan waktu dan sasaran pelaksanaan program	Primer dan Sekunder	Wawancara 1. Pemerintah Kota Pekalongan 2. LSM BINTARI Foundation
4.	<i>Governance</i> (Kejelasan Tata Kelola)	a. Informasi tentang kejelasan siapa yang menjadi anggota kolaborasi b. Informasi tentang kejelasan aturan yang melandasi jalannya program	Primer dan Sekunder	Wawancara 1. Pemerintah Kota Pekalongan 2. LSM BINTARI Foundation

		c. Kejelasan bagaimana kolaborasi akan berjalan		
5.	<i>Access to Authority</i> (Akses Terhadap Tujuan)	a. Informasi tentang landasan hukum tentang mitigasi bencana	Primer dan Sekunder	Wawancara 1. Pemerintah Kota Pekalongan 2. LSM BINTARI Foundation
6.	<i>Distributive Accountability/ Responsibility</i> (Pembagian Akuntabilitas)	a. Informasi tentang pembagian tanggung jawab b. Informasi mengenai tahapan perencanaan hingga evaluasi kebijakan	Primer dan Sekunder	Wawancara 1. Pemerintah Kota Pekalongan 2. LSM BINTARI Foundation
7.	<i>Information Sharing</i> (Berbagi Informasi)	a. Informasi tentang koordinasi antar- <i>stakeholder</i> dan kemudahan akses informasi	Primer dan Sekunder	Wawancara 1. Pemerintah Kota Pekalongan 2. LSM BINTARI Foundation
8.	<i>Access to Resources</i> (Akses Terhadap Sumber Daya)	a. Informasi tentang sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya sarana dan prasarana	Primer dan Sekunder	Wawancara 1. Pemerintah Kota Pekalongan 2. LSM BINTARI Foundation

1.9.5 Analisis Data

Menurut Bogdan (1992) teknik analisis data merupakan suatu proses mencari data kemudian disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat simpulan yang bisa diceritakan pada orang lain (Zakariah, dkk, 2020:52). Tujuan Teknik analisis data adalah untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atau jawaban keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model teknik analisis data interaktif. Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam (Rohmadi & Nasucha, 2015) teknik analisis data interaktif merupakan teknik yang terdiri atas 4 komponen sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data peneliti mencari data penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan yakni wawancara dan dokumentasi yang dicatat dan dikumpulkan untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari studi di lapangan, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Pada prosesnya, hanya temuan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi.

3. Penyajian Data

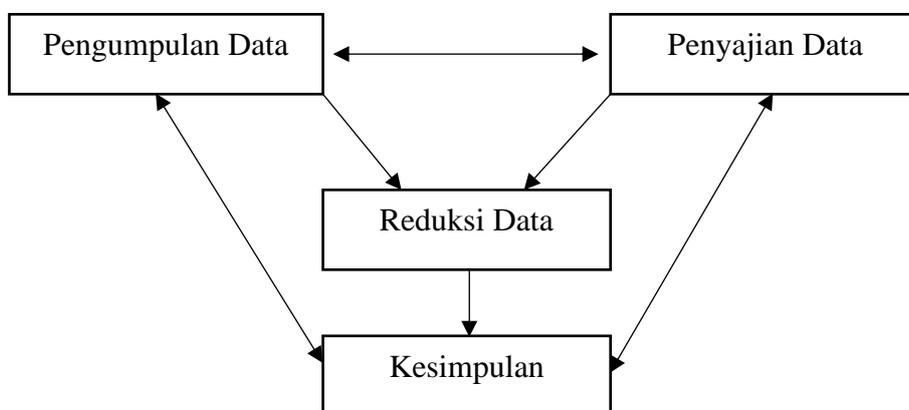
Penyajian data merupakan deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan dari penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

4. Penarikan Kesimpulan

Dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut:

Bagan 1.1

Teknik Analisis Data



Sumber: Matthew B. Miles and A. Michael Huberman 1992 dalam (Salim, 2006)